

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud Dengan Moralitas Individu Sebagai Variabel Moderasi Pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara

Susi Findiowaty¹, Eka Nurmala Sari², Zulia Hanum³

Magister Akuntansi, Program Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

¹susi.findiowaty@gmail.com, ²ekanurmala@umsu.ac.id, ³zuliahhanum@umsu.ac.id

ABSTRACT

This study was conducted to examine and analyze the effect of the government internal control system and whistleblowing on fraud prevention, with individual morality as a moderating variable. The study used an associative research approach. The data collection technique used was questionnaire distribution. The sampling technique used a quota sampling technique with 45 respondents. Path analysis using SEM PLS version 4 was used. Based on the results, it was concluded that the government internal control system has a positive effect on fraud prevention. This indicates that a better government internal control system will improve fraud prevention among employees at the Social Services of North Sumatra Province. The whistleblowing system has a positive effect on fraud prevention. This indicates that a better whistleblowing system will increase fraud prevention among employees at the North Sumatra Provincial Social Service. Individual morality moderates the effect of the government's internal control system on fraud prevention. This means that a better government internal control system, combined with individual morality, will increase fraud prevention among employees at the North Sumatra Provincial Social Service. Individual morality moderates the effect of the whistleblowing system on fraud prevention. This means that a better whistleblowing system, combined with individual morality, will increase fraud prevention among employees at the North Sumatra Provincial Social Service.

Keywords: *Government internal control system, whistleblowing system, fraud prevention, and individual morality.*

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan untuk menguji dan menganalisis Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Fraud Dengan Moralitas Individu Sebagai Variabel Moderasi dengan pendekatan penelitian asosiatif, dan teknik pengumpulan data dengan penyebaran kuesioner, adapun teknik pengambilan sampel menggunakan teknik sampel quota yaitu sebanyak 45 responden dan menggunakan teknik analisis jalur menggunakan aplikasi SEM PLS versi 4. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan kesimpulan bahwa Sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap Pencegahan Fraud dengan arah pengaruh positif, hal ini menunjukkan semakin baik Sistem pengendalian intern pemerintah maka akan meningkatkan Pencegahan Fraud pada pegawai di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara, Whistleblowing system berpengaruh terhadap Pencegahan Fraud dengan arah pengaruh positif, hal ini menunjukkan semakin baik Whistleblowing system maka akan meningkatkan

Pencegahan Fraud pada pegawai di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara, Moralitas Individu memoderasi pengaruh Sistem pengendalian intern pemerintah terhadap Pencegahan Fraud, artinya semakin baik Sistem pengendalian intern pemerintah dan ditambah dengan Moralitas Individu maka akan meningkatkan Pencegahan Fraud pada pegawai di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara dan Moralitas Individu memoderasi pengaruh Whistleblowing system terhadap Pencegahan Fraud, artinya semakin baik Whistleblowing system dan ditambah dengan Moralitas Individu maka akan meningkatkan Pencegahan Fraud pada pegawai di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara.

Kata Kunci: Sistem pengendalian intern pemerintah, Whistleblowing system, Pencegahan Fraud dan Moralitas Individu

PENDAHULUAN

Pencegahan fraud merupakan suatu antisipasi dalam mencegah tindakan ilegal yang dilakukan oleh satu atau lebih orang, baik dengan sengaja maupun tidak, dengan tujuan memperoleh keuntungan melalui berbagai cara, seperti mendapatkan uang, aset, dan lain sebagainya, yang dapat merugikan banyak pihak (Santoso & Pambelum, 2008). Menurut Peraturan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Nomor 1 Tahun 2017, fraud merupakan tindakan yang mengandung niat atau unsur kesengajaan untuk mendapatkan keuntungan secara ilegal, termasuk penipuan, manipulasi, penggelapan, dan penyalahgunaan kepercayaan. Manfaat pencegahan fraud menurut (Izzati & Firmansyah, 2023) menyebutkan ada tiga yaitu Mencegah Kerugian Besar: Meskipun tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian besar jarang mengancam kelangsungan hidup perusahaan, risiko kecurangan tetap signifikan. Dengan menerapkan strategi pencegahan kecurangan, perusahaan dapat mencegah kecurangan menjadi masalah yang meluas dan menghasilkan kerugian yang besar di masa depan, kemudian memberikan wawasan: Implementasi strategi anti penipuan membuka kesempatan bagi perusahaan untuk memahami kerentanan internal. Informasi ini bermanfaat untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan organisasi, memiliki wawasan ini memungkinkan perusahaan untuk memperbaiki program manajemen penipuan mereka dengan lebih efektif selanjutnya meningkatkan kepercayaan efektivitas strategi pencegahan kecurangan dapat meningkatkan kepercayaan dalam organisasi. Ini memberikan perusahaan otoritas yang lebih besar atas masa depan mereka, membuat mereka lebih menarik bagi investor, mitra bisnis, dan peluang lainnya (Marpaung et al., 2023).

Dalam upaya melakukan pencegahan fraud, terdapat beberapa indikator yang dapat membantu dalam meminimalkan tindak kecurangan, seperti kesadaran, manajemen diri, transparan, akuntabel, demokratis, tertib administrasi dan saling percaya (Fathia & Indriani, 2022), selain itu indikator dalam pencegahan fraud yaitu struktur pengendalian intern yang baik, aktivitas pengendalian, kultur organisasi. Dan fungsi pengawasan internal (Biduri et al., 2022). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rutin setiap tahun melakukan survey penilaian integritas kepada seluruh daerah di Indonesia yang bertujuan untuk memetakan celah korupsi yang terjadi di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (K/L/PD), meningkatkan integritas dan kualitas layanan publik, Menekan risiko korupsi dan memantau upaya

pencegahan korupsi (KPK RI, 2022), survey ini dilakukan dengan mengambil responden dari PNS dan Non PNS di Lingkungan pemerintahan untuk mengisi kuesioner yang telah ditetapkan oleh KPK.

Berdasarkan hasil survei penilaian integritas pencegahan korupsi pada Provinsi Sumatera Utara selama tiga tahun terakhir, diketahui bahwa indeks pencegahan korupsi masih berada pada kategori rentan. Pada tahun 2021 indeks tercatat sebesar 69,8, meningkat menjadi 72,4 pada tahun 2022, namun kembali menurun menjadi 70,1 pada tahun 2023. Penurunan ini menunjukkan bahwa tingkat integritas dan efektivitas pencegahan korupsi di Sumatera Utara masih memerlukan perhatian serius. Kondisi tersebut menandakan bahwa upaya pencegahan korupsi belum optimal dan masih terdapat kelemahan dalam sistem pengawasan serta penerapan nilai integritas di lingkungan instansi pemerintah daerah. Fenomena serupa juga terlihat di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara, di mana beberapa kasus kecurangan terungkap dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2024 terjadi dugaan kecurangan tender proyek pemeliharaan gedung senilai Rp 942 juta yang diduga telah diatur untuk pihak tertentu, menunjukkan lemahnya pengawasan dan ketidaktertiban administrasi. Selain itu, pada tahun 2022 juga terungkap kasus korupsi dana makan dan minum untuk Warga Binaan Sosial (WBS) yang melibatkan pegawai Dinas Sosial dengan kerugian negara mencapai Rp 875 juta lebih. Kedua kasus tersebut mencerminkan lemahnya pengendalian internal dan tidak berfungsinya mekanisme whistleblowing, di mana pegawai yang mengetahui pelanggaran enggan melapor kepada pihak berwenang.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan penelitian yang menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pencegahan fraud di instansi pemerintah, khususnya di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara. Beberapa faktor penting yang memengaruhi pencegahan fraud antara lain sistem pengendalian intern pemerintah, whistleblowing system, dan moralitas individu. Sistem pengendalian intern yang baik dapat meningkatkan efisiensi, keandalan laporan keuangan, serta kepatuhan terhadap peraturan (Azhar Susanto, 2014). Whistleblowing system berperan sebagai sarana pengungkapan pelanggaran untuk mencegah dan mendeteksi tindakan curang (Sujana et al., 2020). Sementara itu, moralitas individu berperan penting dalam membentuk perilaku etis pegawai, di mana semakin tinggi moralitas seseorang maka semakin kecil kecenderungannya untuk melakukan kecurangan (Udayani et al., 2017).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kuantitatif asosiatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh antara dua atau lebih variabel. Pendekatan ini digunakan karena penelitian berfokus pada pengujian hipotesis mengenai pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Whistleblowing System terhadap Pencegahan Fraud dengan Moralitas Individu sebagai variabel moderasi. Data yang digunakan berupa data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner dengan skala Likert 1–5 kepada responden yang terlibat langsung dalam sistem pengawasan dan pengendalian internal di

lingkungan pemerintahan. Adapun objek penelitian ini adalah pegawai di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara, yang dipilih karena instansi tersebut memiliki peran strategis dalam pengelolaan dana dan pelayanan publik sehingga berpotensi menghadapi risiko kecurangan apabila sistem pengendalian dan mekanisme pelaporan tidak berjalan efektif. Dengan demikian, penelitian ini difokuskan untuk menganalisis sejauh mana efektivitas SPIP dan Whistleblowing System dapat mencegah terjadinya fraud, serta bagaimana Moralitas Individu memperkuat atau memperlemah hubungan antara kedua variabel tersebut terhadap upaya pencegahan kecurangan di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Deskripsi Responden

Berdasarkan hasil penelitian yang melibatkan 45 responden yang merupakan pegawai di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara, karakteristik responden dapat dijelaskan sebagai berikut. Berdasarkan jenis kelamin, mayoritas responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 38 orang (84,4%), sedangkan responden perempuan sebanyak 7 orang (15,6%). Berdasarkan tingkat pendidikan terakhir, sebagian besar responden memiliki pendidikan Sarjana (S1) sebanyak 38 orang (84,4%), diikuti oleh Magister (S2) sebanyak 4 orang (8,8%), dan SMA/SMK sebanyak 3 orang (6,6%). Jika dilihat dari lama bekerja, mayoritas responden telah bekerja selama 1–5 tahun yaitu sebanyak 28 orang (62,2%), kemudian yang telah bekerja selama lebih dari 5 tahun sebanyak 14 orang (31,1%), dan yang bekerja kurang dari 1 tahun sebanyak 3 orang (8,8%). Berdasarkan bidang pendidikan, responden dengan latar belakang Manajemen mendominasi sebanyak 25 orang (55,5%), diikuti oleh Hukum sebanyak 12 orang (26,6%), bidang lainnya sebanyak 6 orang (24%), dan Akuntansi sebanyak 2 orang (4,4%). Sementara itu, berdasarkan lama bekerja di pemerintahan, mayoritas responden telah bekerja selama 2–5 tahun sebanyak 31 orang (68,8%), diikuti oleh responden yang bekerja lebih dari 5 tahun sebanyak 10 orang (20,8%), dan yang bekerja kurang dari 2 tahun sebanyak 4 orang (8,8%). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini didominasi oleh pegawai laki-laki dengan latar belakang pendidikan Sarjana (S1), mayoritas memiliki bidang keilmuan manajemen, dan telah memiliki pengalaman kerja yang cukup lama baik di lingkungan Dinas Sosial maupun di pemerintahan, sehingga diharapkan mampu memberikan jawaban yang relevan dan representatif terhadap penelitian ini.

Hasil Analisis PLS -SEM

Penelitian ini dianalisis menggunakan perangkat lunak SmartPLS 4.0 dengan dua tahapan utama. Tahap pertama adalah *outer model* (model pengukuran) yang bertujuan mengevaluasi validitas dan reliabilitas indikator, sedangkan tahap kedua adalah *inner model* (model struktural) yang digunakan untuk menguji keterkaitan antar variabel laten dalam model penelitian.

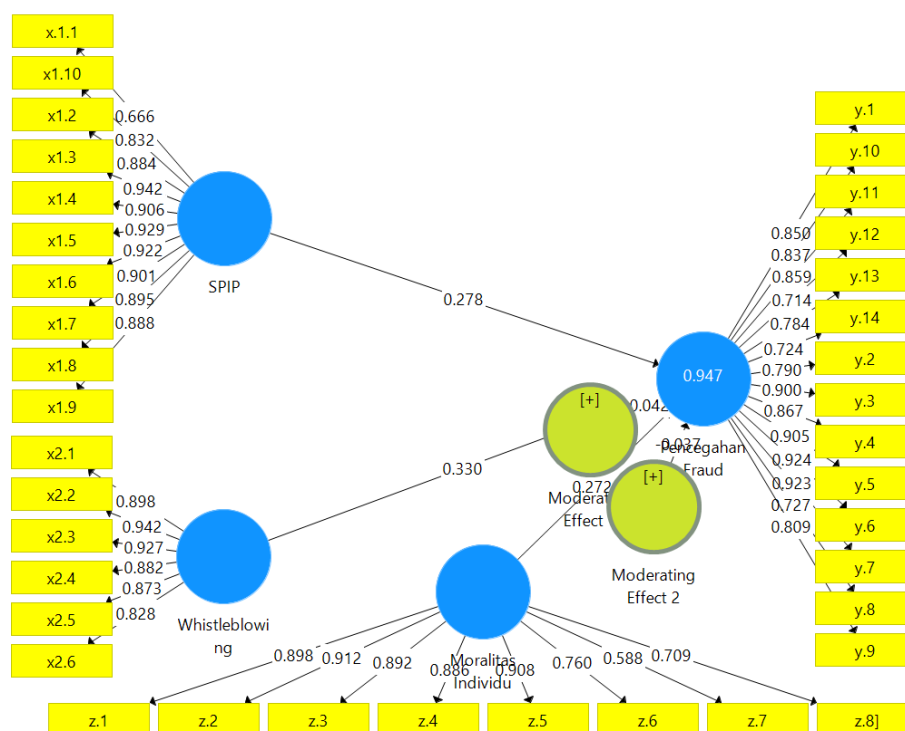
Hasil Pengujian *Outer Model* (Model Pengukuran)

Hasil pengujian Outer Model (Model Pengukuran) bertujuan untuk menilai validitas dan reliabilitas indikator dalam mengukur konstruk penelitian. Pengujian ini mencakup convergent validity untuk memastikan korelasi kuat antar indikator melalui nilai loading factor ($> 0,7$) dan AVE ($> 0,5$), discriminant validity untuk membedakan antar konstruk, serta uji reliabilitas melalui composite reliability dan Cronbach's alpha ($> 0,7$). Dengan demikian, outer model memastikan bahwa instrumen penelitian layak digunakan sebelum dilakukan analisis struktural pada inner model. Berikut ini disajikan hasil dari uji model pengukuran (Outer Model) yang diperoleh melalui analisis menggunakan software SmartPLS dalam penelitian ini:

Convergent Validity

Convergent validity digunakan untuk mengukur sejauh mana indikator-indikator dalam satu konstruk saling berkorelasi dan mampu merepresentasikan variabel laten yang diukur. Pengujian dilakukan dengan melihat nilai loading factor, average variance extracted (AVE), dan composite reliability. Suatu indikator dinyatakan valid jika memiliki nilai loading factor lebih dari 0,7 dan AVE di atas 0,5, yang berarti indikator tersebut mampu menjelaskan variabel laten dengan baik. Hasil *loading factor* pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Gambar 1. Hasil Uji *Loading Factor*



Gambar tersebut menunjukkan hasil analisis Partial Least Square Structural Equation Modeling (PLS-SEM) yang menggambarkan hubungan antara variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Whistleblowing, Moralitas Individu,

dan Pencegahan Fraud. Nilai loading factor seluruh indikator berada di atas 0,7, yang menandakan bahwa instrumen penelitian valid dan mampu merefleksikan konstruksinya dengan baik. Berdasarkan hasil analisis jalur, SPIP berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud dengan koefisien sebesar 0,278, sedangkan whistleblowing memiliki pengaruh positif yang lebih kuat sebesar 0,330. Selain itu, moralitas individu berperan sebagai variabel moderasi, di mana interaksi antara moralitas individu dan SPIP (0,272) memperkuat pengaruh SPIP terhadap pencegahan fraud, sedangkan efek moderasi moralitas individu terhadap hubungan whistleblowing dan pencegahan fraud relatif lemah (0,042). Nilai R-square sebesar 0,947 menunjukkan bahwa 94,7% variasi pencegahan fraud dapat dijelaskan oleh ketiga variabel tersebut beserta efek moderasinya, yang berarti model ini memiliki daya jelaskan yang sangat kuat terhadap fenomena pencegahan fraud di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara.

Selanjutnya, pengujian Average Variance Extracted (AVE). Nilai AVE > 0,5 menunjukkan tingkat convergent validity yang baik. Nilai AVE pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Hasil Average Variance Extracted (AVE)

	Average Variance Extracted (AVE)
Moralitas Individu	0,684
Pencegahan Fraud	0,693
SPIP	0,774
Whistleblowing	0,797

Berdasarkan hasil Average Variance Extracted (AVE) pada tabel di atas, seluruh variabel dalam penelitian ini memiliki nilai AVE di atas 0,5, yang menunjukkan bahwa masing-masing konstruk memiliki validitas konvergen yang baik karena mampu menjelaskan lebih dari 50% varians indikatornya. Nilai AVE tertinggi terdapat pada variabel Whistleblowing sebesar 0,797, diikuti oleh SPIP sebesar 0,774, Pencegahan Fraud sebesar 0,693, dan Moralitas Individu sebesar 0,684. Hal ini menunjukkan bahwa indikator-indikator yang digunakan pada keempat variabel tersebut secara konsisten mampu merepresentasikan konstruksinya dengan baik, sehingga model pengukuran dalam penelitian ini dapat dinyatakan reliabel dan valid untuk digunakan pada tahap analisis struktural berikutnya.

Composite Reliability

Uji *Composite Reliability* dilakukan untuk menilai konsistensi internal dari setiap konstruk dalam model. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai *Composite Reliability* di atas 0,70, yang berarti setiap konstruk dinyatakan reliabel. Dengan demikian, indikator-indikator pada masing-masing variabel mampu secara konsisten mengukur konsep yang sama, sehingga model memiliki tingkat keandalan yang baik untuk dianalisis lebih lanjut.

Tabel 2. Hasil Composite Reliability

Variabel	Cronbach Alpha	Composite Reliability
Moralitas Individu	0,930	0,944
Pencegahan Fraud	0,965	0,969
SPIP	0,967	0,971
Whistleblowing	0,949	0,959

Berdasarkan Tabel 2, hasil uji Composite Reliability menunjukkan bahwa seluruh variabel penelitian memiliki nilai Cronbach's Alpha dan Composite Reliability di atas 0,7, yang berarti seluruh konstruk memiliki konsistensi internal yang sangat baik. Nilai Cronbach's Alpha tertinggi terdapat pada variabel SPIP (0,967) dan nilai Composite Reliability tertinggi juga terdapat pada SPIP (0,971), yang menunjukkan bahwa indikator-indikator pada variabel tersebut sangat reliabel dalam mengukur konstraknya. Secara keseluruhan, hasil ini mengindikasikan bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian ini mampu menghasilkan data yang konsisten dan dapat dipercaya untuk menggambarkan masing-masing variabel, yaitu moralitas individu, pencegahan fraud, SPIP, dan whistleblowing.

Hasil Pengujian Inner Model (Model Struktural)

Hasil pengujian inner model atau model struktural bertujuan untuk menilai hubungan antar variabel laten serta mengukur kekuatan dan arah pengaruh di antara variabel-variabel dalam model penelitian. Pengujian ini dilakukan setelah model pengukuran (outer model) dinyatakan valid dan reliabel. Evaluasi inner model meliputi nilai R-Square (R^2) untuk melihat seberapa besar variabel independen menjelaskan variabel dependen. Selain itu, pengujian hipotesis dilakukan melalui metode bootstrapping dengan melihat nilai t-statistic dan p-value; hipotesis dinyatakan signifikan apabila t-statistic $\geq 1,96$ dan p-value $\leq 0,05$. Hasil dari tahap ini memberikan gambaran mengenai besarnya pengaruh langsung maupun tidak langsung antar variabel penelitian.

Tabel 3. Hasil R-Square

Variabel	R Square	R Square Adjusted	Kategori
Pencegahan Fraud	0,947	0,940	Kuat

Berdasarkan Tabel 3, nilai R-Square untuk variabel pencegahan fraud sebesar 0,947 dengan nilai R-Square Adjusted sebesar 0,940, yang termasuk dalam kategori kuat. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen dalam model penelitian mampu menjelaskan 94,7% variasi yang terjadi pada variabel pencegahan fraud, sedangkan sisanya sebesar 5,3% dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Nilai yang tinggi ini mengindikasikan bahwa model penelitian memiliki kemampuan prediktif yang sangat baik, sehingga variabel-variabel seperti moralitas individu, SPIP, dan

whistleblowing secara bersama-sama memberikan kontribusi yang signifikan terhadap upaya pencegahan fraud.

Selanjutnya melihat dari nilai F-Square, pengukuran F-Square digunakan untuk menilai besarnya efek relatif suatu variabel eksogen terhadap variabel endogen, dengan kriteria 0,02 menunjukkan efek kecil, 0,15 efek sedang, dan 0,35 efek besar (Juliandi, 2018). Nilai F-Square pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 4. Hasil F-Square

	Pencegahan Fraud
Moralitas Individu	0,233
SPIP	0,430
Whistleblowing	0,432

Berdasarkan Tabel 4, hasil F-Square menunjukkan bahwa variabel Whistleblowing memiliki nilai tertinggi yaitu 0,432, diikuti oleh SPIP sebesar 0,430, dan Moralitas Individu sebesar 0,233 terhadap variabel Pencegahan Fraud. Nilai F-Square yang berada di atas 0,02 menandakan adanya pengaruh yang signifikan dari masing-masing variabel terhadap konstruk dependen. Secara interpretatif, nilai antara 0,15–0,35 dikategorikan sebagai pengaruh sedang, sedangkan di atas 0,35 menunjukkan pengaruh kuat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Whistleblowing dan SPIP memiliki pengaruh kuat terhadap Pencegahan Fraud, sedangkan Moralitas Individu memberikan pengaruh sedang namun tetap signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan fraud di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara lebih efektif ketika didukung oleh sistem pengendalian intern dan mekanisme whistleblowing yang baik, serta diperkuat oleh moralitas individu pegawai yang tinggi.

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis pada penelitian ini dilakukan dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS versi 4.0 menggunakan metode bootstrapping. Proses analisis ini berfokus pada interpretasi nilai t-statistik dan p-value sebagai dasar pengambilan keputusan. Suatu variabel independen dinyatakan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen apabila nilai t-statistik > 1,99 dan p-value < 0,05 (Dahrani et al., 2022). Adapun hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini disajikan sebagai berikut.

Tabel 5. Hasil Uji Pengaruh Langsung

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
SPIP -> Pencegahan Fraud	0,278	0,285	0,149	3,866	0,000
Whistleblowing -> Pencegahan Fraud	0,230	0,329	0,192	3,720	0,000

Berdasarkan hasil uji pengaruh langsung pada Tabel 5, diperoleh bahwa variabel SPIP berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pencegahan Fraud, yang ditunjukkan oleh nilai t-statistic sebesar 3,866 ($> 1,99$) dan p-value sebesar 0,000 ($< 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), maka semakin tinggi pula efektivitas upaya pencegahan fraud dalam organisasi. Dengan kata lain, penerapan SPIP yang kuat melalui pengawasan, pengendalian risiko, serta peningkatan kepatuhan prosedural dapat memperkecil peluang terjadinya kecurangan.

Selanjutnya, variabel Whistleblowing juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pencegahan Fraud, dengan nilai t-statistic sebesar 3,720 ($> 1,99$) dan p-value 0,000 ($< 0,05$). Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin efektif sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system) yang diterapkan, maka semakin besar pula kemampuan organisasi dalam mendeteksi dan mencegah praktik kecurangan sejak dini. Dengan demikian, budaya transparansi dan keberanian melapor yang difasilitasi oleh sistem whistleblowing terbukti berkontribusi signifikan terhadap peningkatan integritas dan pencegahan fraud di lingkungan organisasi.

Tabel 6. Hasil Uji Moderasi

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
Moderating Effect 1 -> Pencegahan Fraud	0,242	0,029	0,187	2,024	0,008
Moderating Effect 2 -> Pencegahan Fraud	0,237	0,046	0,192	2,192	0,005

Berdasarkan hasil uji moderasi pada Tabel 6, diketahui bahwa Moderating Effect 1 berperan sebagai variabel moderasi yang signifikan terhadap Pencegahan Fraud, dengan nilai t-statistic sebesar 2,024 ($> 1,99$) dan p-value sebesar 0,008 ($< 0,05$). Nilai ini menunjukkan bahwa efek moderasi bersifat signifikan, artinya keberadaan variabel moderasi memperkuat hubungan antara variabel independen dan Pencegahan Fraud. Dengan demikian, faktor moderasi pertama mampu meningkatkan efektivitas pengaruh variabel utama dalam mendorong terciptanya sistem pencegahan fraud yang lebih optimal melalui mekanisme pengawasan dan pengendalian yang lebih adaptif terhadap kondisi organisasi.

Selanjutnya, Moderating Effect 2 juga menunjukkan hasil yang signifikan dengan nilai t-statistic sebesar 2,192 ($> 1,99$) dan p-value 0,005 ($< 0,05$). Temuan ini menandakan bahwa variabel moderasi kedua turut memperkuat hubungan antara variabel independen dan Pencegahan Fraud. Dengan adanya efek moderasi ini, hubungan yang semula positif menjadi lebih kuat, sehingga peningkatan variabel independen akan memberikan dampak yang lebih besar terhadap upaya pencegahan fraud. Hal ini mengindikasikan bahwa keberadaan faktor moderasi, baik dalam bentuk kebijakan, sistem pengawasan, maupun budaya organisasi, mampu

memperkuat sinergi antar variabel dalam menciptakan lingkungan kerja yang berintegritas dan bebas dari praktik kecurangan.

Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh Moralitas Individu, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan Whistleblowing terhadap Pencegahan Fraud, dengan variabel moderasi yang berperan dalam memperkuat hubungan antarvariabel tersebut. Pembahasan penelitian ini disusun berdasarkan hasil pengolahan data empiris yang diperoleh dari responden, kemudian dikaitkan dengan teori-teori yang relevan, pandangan para ahli, serta hasil penelitian terdahulu yang telah dibahas sebelumnya. Melalui analisis ini, diperoleh gambaran mengenai sejauh mana moralitas individu, efektivitas sistem pengendalian intern, dan penerapan whistleblowing berkontribusi terhadap upaya pencegahan kecurangan di lingkungan organisasi sektor publik. Adapun hasil temuan penelitian diuraikan dan dibahas secara rinci dalam bagian berikut ini.

Pengaruh Sistem pengendalian intern pemerintah terhadap Pencegahan Fraud

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pencegahan Fraud, dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,278 dan t-statistic sebesar $3,866 > 1,67$, serta nilai p-value sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan SPIP dalam suatu instansi, maka semakin tinggi pula tingkat pencegahan terhadap potensi kecurangan. Berdasarkan tanggapan responden, variabel SPIP yang diukur melalui indikator standar operasional, pengelolaan anggaran, dan pertanggungjawaban memperoleh nilai rata-rata sebesar 4,25 yang termasuk kategori sangat baik. Hal ini memperlihatkan bahwa sebagian besar responden menilai pelaksanaan SPIP telah berjalan efektif, terutama pada aspek penetapan aturan dan standar etika oleh pimpinan. Meski demikian, nilai outer loading terendah sebesar 0,666 menunjukkan bahwa aspek penegakan etika pegawai masih perlu diperkuat agar implementasi SPIP dapat berjalan lebih optimal.

Secara konseptual, SPIP merupakan suatu proses integral dalam kegiatan organisasi yang bertujuan memberikan keyakinan memadai atas tercapainya efektivitas dan efisiensi operasional, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam konteks pencegahan fraud, sistem pengendalian yang efektif dapat mempersempit ruang terjadinya penyimpangan, manipulasi data, maupun penyalahgunaan wewenang. SPIP yang berjalan baik ditandai dengan adanya pembagian tugas yang jelas, penilaian risiko yang sistematis, mekanisme pengawasan yang transparan, dan komunikasi yang terbuka antara seluruh elemen organisasi. Oleh karena itu, penerapan SPIP secara menyeluruh dapat meningkatkan akuntabilitas serta mengurangi potensi terjadinya kecurangan dalam pengelolaan keuangan dan kegiatan operasional pemerintah.

Temuan penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Merawati & Mahaputra (2021), Utami & Sarwono (2019), Islamiyah et

al. (2020), Azizah & Erinos (2022), dan Noya et al. (2023), yang menyatakan bahwa semakin baik sistem pengendalian intern yang diterapkan suatu instansi, maka semakin rendah pula tingkat kecurangan yang terjadi. SPIP berperan penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas, dengan memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan serta dapat diawasi secara efektif. Dengan demikian, penguatan sistem pengendalian intern di lingkungan instansi pemerintah, termasuk pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara, merupakan langkah strategis dalam meningkatkan transparansi, kepercayaan publik, dan pencegahan fraud secara berkelanjutan.

Pengaruh Whistleblowing system terhadap Pencegahan Fraud

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa Whistleblowing System memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pencegahan Fraud, dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,230, t-statistic sebesar 3,720 > 1,67, dan p-value sebesar 0,000 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan efektivitas sistem whistleblowing akan diikuti oleh peningkatan kemampuan organisasi dalam mencegah kecurangan. Berdasarkan hasil tanggapan responden, variabel whistleblowing yang diukur melalui tiga indikator memperoleh nilai rata-rata sebesar 4,37 yang termasuk dalam kategori sangat baik. Skor tertinggi terdapat pada item “Kesediaan untuk melaporkan pelanggaran karena perusahaan menjamin kerahasiaan identitas pelapor” dengan 60% responden menjawab sangat baik. Nilai outer loading tertinggi sebesar 0,942 menunjukkan bahwa jaminan kerahasiaan pelapor menjadi faktor utama yang mempengaruhi efektivitas whistleblowing, sementara outer loading terendah sebesar 0,873 mengindikasikan perlunya peningkatan pada aspek evaluasi dan perbaikan sistem secara berkelanjutan.

Dalam konteks pengawasan internal, Whistleblowing System (WBS) berfungsi sebagai mekanisme penting yang memungkinkan pegawai maupun pihak eksternal melaporkan pelanggaran, penyimpangan, atau tindakan kecurangan secara aman dan anonim. Sistem ini disusun untuk mempersempit ruang gerak pelaku kecurangan sekaligus menciptakan rasa pengawasan moral di lingkungan kerja. Adanya saluran komunikasi khusus seperti hotline, email, atau portal pelaporan menjadi sarana yang efektif dalam mendeteksi dini potensi pelanggaran. Ketika sistem ini berjalan dengan baik, oknum pegawai akan merasa selalu berada dalam pengawasan, sehingga peluang untuk melakukan tindakan curang dapat diminimalkan. Selain itu, pelaporan yang cepat melalui WBS juga memungkinkan organisasi mengambil langkah investigasi dan tindakan korektif sebelum kerugian yang lebih besar terjadi.

Efektivitas whistleblowing system sangat bergantung pada komitmen pimpinan dan kebijakan perlindungan terhadap pelapor agar tercipta rasa aman dan kepercayaan. Sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai alat deteksi fraud, tetapi juga membangun budaya integritas, transparansi, dan akuntabilitas di lingkungan organisasi. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Biduri et al. (2023), Mahdi & Darwis (2020), Islamiyah et al. (2020), Sujana et al. (2020), Zulfa & Rakhmawati (2023), Haryanto & Ardillah (2021), Amin et al. (2024), dan Harahap et al. (2022)

yang menyimpulkan bahwa penerapan whistleblowing system berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud. Dengan demikian, penerapan WBS yang independen, rahasia, serta didukung kebijakan tindak lanjut yang jelas menjadi faktor kunci dalam menciptakan sistem pengawasan yang efektif dan kredibel di instansi pemerintah.

Pengaruh Sistem pengendalian intern pemerintah terhadap Pencegahan Fraud yang dimoderasi Moralitas Individu

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Moralitas Individu mampu memoderasi pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Pencegahan Fraud. Hal ini dibuktikan melalui nilai T Statistic sebesar 2,024 yang lebih besar dari t table (1,67) dan nilai P Values sebesar 0,008 yang lebih kecil dari 0,05. Artinya, moralitas individu memperkuat hubungan antara efektivitas penerapan SPIP dan keberhasilan pencegahan fraud di lingkungan instansi pemerintah. Berdasarkan hasil tanggapan responden, rata-rata skor variabel Pencegahan Fraud sebesar 4,12 termasuk dalam kategori baik, dengan indikator tertinggi menunjukkan bahwa praktik-praktik demokratis dalam pengelolaan dana telah diterapkan secara optimal. Responden juga menilai bahwa transparansi laporan keuangan publik menjadi faktor paling menonjol dalam mencegah kecurangan.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berfungsi sebagai seperangkat kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk melindungi aset pemerintah, memastikan keandalan informasi keuangan, serta menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Meskipun SPIP menyediakan mekanisme formal dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan, efektivitasnya sangat bergantung pada moralitas individu aparatur yang melaksanakannya. Moralitas yang tinggi mendorong pegawai untuk patuh terhadap kebijakan dan menjauhi praktik penyimpangan, sementara moralitas yang rendah justru dapat melemahkan sistem pengendalian yang sudah dibangun. Dengan demikian, sistem pengendalian yang baik tanpa dukungan moralitas individu berpotensi hanya menjadi prosedur administratif tanpa substansi etis.

Oleh karena itu, upaya pencegahan fraud tidak cukup hanya mengandalkan penerapan SPIP secara teknis, tetapi juga harus diiringi dengan pembentukan karakter dan integritas pegawai. Peningkatan moralitas individu dapat dilakukan melalui pelatihan etika, penguatan budaya organisasi yang berintegritas, serta keteladanan pimpinan yang menanamkan nilai kejujuran dan tanggung jawab. Sinergi antara sistem pengendalian yang kuat dan moralitas individu yang tinggi akan menciptakan lingkungan birokrasi yang transparan, akuntabel, dan bebas dari kecurangan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Islamiyah et al. (2020) yang menyatakan bahwa moralitas individu berperan signifikan dalam memperkuat pengaruh sistem pengendalian intern terhadap pencegahan fraud, sehingga secara keseluruhan berdampak positif terhadap integritas organisasi sektor publik.

Pengaruh Whistleblowing system terhadap Pencegahan Fraud yang dimoderasi Moralitas Individu

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Moralitas Individu berperan sebagai variabel moderasi yang memperkuat pengaruh Whistleblowing System terhadap Pencegahan Fraud. Hal ini dibuktikan dengan nilai T Statistic sebesar 2,192 yang lebih besar dari t table (1,67) dan P Values sebesar 0,005 yang lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan hasil tanggapan responden, variabel Moralitas Individu memiliki rata-rata penilaian sebesar 4,26 dan termasuk dalam kategori sangat baik. Indikator dengan skor tertinggi menunjukkan bahwa responden telah mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam menyelesaikan tugas, mencerminkan tingkat kepatuhan dan kesadaran moral yang tinggi. Sementara itu, sebagian besar responden memberikan penilaian “sangat baik” sebesar 54%, yang menandakan bahwa penerapan nilai-nilai moral di lingkungan kerja sudah berjalan optimal.

Whistleblowing System (WBS) berfungsi sebagai mekanisme pelaporan kecurangan yang memberikan ruang bagi pegawai untuk menyampaikan dugaan pelanggaran secara aman, baik secara terbuka maupun anonim. Sistem ini menjadi alat penting dalam upaya pencegahan fraud karena menciptakan transparansi dan memperluas pengawasan di lingkungan instansi. Namun, efektivitas sistem tersebut tidak hanya bergantung pada keberadaannya, tetapi juga pada tingkat moralitas individu yang menggunakan sistem itu. Moralitas individu yang tinggi mendorong pegawai untuk menggunakan WBS secara bertanggung jawab demi menjaga integritas organisasi, sedangkan moralitas yang rendah dapat menghambat keberanian untuk melapor atau bahkan menyebabkan penyalahgunaan sistem. Dengan demikian, moralitas berfungsi sebagai penguat yang menentukan apakah whistleblowing akan benar-benar berperan dalam pencegahan kecurangan atau tidak.

Untuk meningkatkan efektivitas Whistleblowing System dalam mencegah fraud, organisasi perlu menanamkan nilai-nilai etika dan moral kepada seluruh pegawai melalui pelatihan integritas, pembinaan karakter, serta keteladanan pimpinan. Lingkungan kerja yang menjunjung tinggi kejujuran, keterbukaan, dan perlindungan terhadap pelapor akan memperkuat moralitas individu serta menciptakan budaya organisasi yang bersih dan transparan. Sinergi antara sistem pelaporan yang baik dan moralitas pegawai yang tinggi menjadi fondasi penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Temuan ini sejalan dengan penelitian Merawati & Mahaputra (2021) dan Kuswandi (2020) yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat penalaran moral individu, semakin rendah kecenderungan seseorang melakukan kecurangan. Sebaliknya, rendahnya kualitas moral individu berpotensi meningkatkan risiko tindakan fraud yang merugikan organisasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh positif terhadap Pencegahan

Fraud, yang berarti semakin baik penerapan sistem pengendalian internal maka semakin tinggi pula kemampuan instansi dalam mencegah terjadinya kecurangan pada pegawai di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya, Whistleblowing System juga terbukti berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud, menunjukkan bahwa sistem pelaporan yang transparan dan efektif mampu mempersempit ruang bagi praktik kecurangan. Selain itu, Moralitas Individu terbukti memoderasi hubungan antara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pencegahan Fraud, yang menunjukkan bahwa moralitas pegawai yang tinggi dapat memperkuat efektivitas sistem pengendalian dalam mencegah tindakan curang. Demikian pula, Moralitas Individu juga memoderasi pengaruh Whistleblowing System terhadap Pencegahan Fraud, artinya semakin tinggi tingkat moralitas individu dan semakin baik pelaksanaan sistem whistleblowing, maka upaya pencegahan kecurangan di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara akan semakin optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, R., Astuti, W., & Sari, E. N. (2024). The Impact of Subjective Norms, Professional Competency on Whistleblowing Intention Within the OPD in Asahan District With Reward as A Moderating Factor. *Income Journal.*, 3(2), 41–46.
- Arthana, I. K. (2019). Analisis faktor-faktor terjadinya kecurangan (fraud) dalam pengelolaan dana desa pada Kecamatan Amabi Oefeto Timur. *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 7(1), 35–43.
- Asrin, Djinar, S., Budhi, M. K. S., & Yasa, W. M. (2021). The Effect Of Internal Control System, Utilization Of Information Technology, And Human Resource Competency On Village Financial Integrity And Fraud Prevention. *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education*, 12(13), 7025–7036.
- Azizah, N., & Erinos, E. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan Asimetri Informasi terhadap Pencegahan Fraud. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 4(4), 674–685. <https://doi.org/10.24036/jea.v4i4.494>
- Azwar, J., Irfan, I., & Saprial, M. (2015). *Metodelogi Penelitian Bisnis Konsep dan Aplikasi*. UMSU Press.
- Biduri, S., Ferisanti, R. A., & Sigit Hermawan. (2023). Pencegahan Kecurangan di Pemerintah Desa melalui Moralitas Individual. *Jurnal Riset Dan Aplikasi: Akuntansi Dan Manajemen*, 6(2), 185–196. <https://doi.org/10.33795/jraam.v6i2.005>
- Dickins, D., & Fay, R. G. (2022). COSO 2013: Aligning internal controls and principles. *Issues in Accounting Education*, 32(3), 117–127.
- Fathia, J., & Indriani, M. (2022). Pengaruh sistem keuangan desa terhadap pencegahan kecurangan (fraud) pengelolaan dana desa dengan moralitas individu sebagai pemoderasi (studi di Desa Kabupaten/Kota Provinsi Aceh). *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 455–468.
- Harahap, D. S. P., Nasrizal, N., Indrawati, N., & Sandri, S. H. (2022). The Pengaruh Internal Audit Dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud Dengan

- Moralitas Individu Sebagai Variabel Moderator (Studi Empiris Pada Bank Perkreditan Rakyat Di Provinsi Riau). *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 12(1), 82–91. <https://doi.org/10.37859/jae.v12i1.3065>
- Haryanto, K., & Ardillah, K. (2021). The Impact of Internal Audit, Internal Control and Whistleblowing System on Fraud Prevention in the Indonesia Banking Companies during the COVID-19 Pandemic. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Ekonomika*, 14(1), 27–38.
- Indriyani, R., Surono, Margapradja, H. S., Sari, F., & Halimahtusyahdiyah, N. (2023). Pengaruh Whistleblowing Dan Audit Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(3), 637–654.
- Inna, I. Z., & Sulistiyantoro, D. (2023). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Aksesibilitas Informasi Desa, Kompetensi Ap Ara Tur Desa, Sistem Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Lnformasi, Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 7(2), 185–199.
- Islamiyah, F., Made, A., & Sari, A. R. (2020). Pengaruh kompetensi aparatur desa, moralitas, sistem pengendalian internal, dan whistleblowing terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Wajak. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 8(1).
- Izzati, A. K., & Firmansyah, A. (2023). Fraud Diamond Theory, Efektivitas Belanja Pemerintah Dan Komitmen Organisasi. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 23(1), 65–90. <https://doi.org/10.25105/mraai.v23i1.15845>
- Mahdi, S. A., & Darwis, H. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud Dengan Kecerdasan Priritual Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Aparat Pemerintah Desa Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat). *Jurn Ilmiah Akuntansi Peradapan*, 6(2), 184–198.
- Marpaung, L. W., Astuty, W., & Sari, E. N. (2023). Analisis Kredibilitas Dan Tanggung Jawab Auditor Pemerintah Dalam Pendeteksian Fraud Pada Laporan Keuangan Provinsi Sumatera Utara. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 6(1), 523–531.
- Merawati, L., & Mahaputra, I. (2021). Morality, Internal Control And Gender In The Tendency Of Fraud. *Journal of Accounting*, 21(1), 35.
- Putri, U. D., & Sofyan, E. (2023). Pengaruh Whistleblowing System, Bystander Effect, dan Anti-fraud Awareness terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa pada Kabupaten Sijunjung. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5(4), 1588–1598. <https://doi.org/10.24036/jea.v5i4.1151>
- Qorirah, N. F., & Syofyan, E. (2024). Pengaruh Pengendalian Internal, Moralitas Individu, dan Whistleblowing System terhadap Pencegahan Fraud. *Jurnal Nuansa Karya Akuntansi*, 2(1), 82–96. <https://doi.org/10.24036/jnka.v2i1.53>
- Rahmat, M., Wisra, M., Kholik, M. A., & Basnawati, S. R. (2023). Pengaruh Audit Internal, Kompetensi Auditor, Kesesuaian Kompensasi Dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud. *Postgraduate Management Journal*, 2(2), 42–54.
- Rakanti, R. (2024). Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas, Sistem Pengendalian

- Internal, dan Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa Ni Putu Tarisa Putri Rakanti 1* , Ni Made Dwi Ratnadi 2 1,2. *Bisnis, Jurnal Akuntansi Akuntansi, Program Studi Udayana, Universitas*, 22(2), 258–273.
- Santoso, U., & Pambelum, Y. J. (2008). Pengaruh penerapan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam mencegah fraud. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 4(1).
- Sari, E. N. (2015). Accounting practices effectiveness and good governance: Mediating effects of accounting information quality in municipal office of Medan City, Indonesia. *Research Journal of Finance and Accounting*, 6(2), 1–20.
- Sari, E. N., & Yusnaini, Y. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Medan: Perdana Publishing.
- Sujana, I. K., Suardikha, I. M. S., & Laksmi, P. S. P. (2020). Whistleblowing System, Competence, Morality, and Internal Control System Against Fraud Prevention on Village Financial Management in Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(11), 2780. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i11.p06>
- Sunarka, P. S., & Bakhtiar, M. R. (2019). Pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi, pengendalian internal, kompleksitas tugas, dan budaya organisasi terhadap kinerja karyawan. *Jurnal Ilmiah Aset*, 21(1), 53–62.
- Susanto, A., & Meiryani. (2019). The impact of environmental accounting information system alignment on firm performance and environmental performance: a case of small and medium enterprises s of Indonesia. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 9(2), 229–236.
- Udayani, udayani, Maria, S., & Ratna, M. (2017). Pengaruh pengendalian internal dan moralitas individu pada kecenderungan kecurangan akuntansi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(3), 1744–1799.
- Utami, Z. D., & Sarwono, A. E. (2019). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Desa, Lingkungan Pengendalian Dan Moralitas Perangkat Terhadap Potensi Fraud Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Sungai Golang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu). *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 15(3).
- Van Akkeren, J. (2023). Fraud triangle: Cressey's fraud triangle and alternative fraud theories. In *Encyclopedia of Business and Professional Ethics* (pp. 917–920). Springer.
- Zakaria, M., Rosnidah, I., Sari, E. N., & Nawi, N. A. (2020). Predicting internal and external whistleblowing intentions: A comparative study between Malaysian and Indonesian police forces. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 13(7), 44–66.
- Zulfa, A. A., & Rakhmawati, I. (2023). Prevention of Fraud in the Management of Village Funds: The Influence of the Competence of Village Apparatuses, Whistleblowing System, Moral Sensitivity, and Effectiveness of Internal Control in Karanganyar District. *PROCEEDING ICONIEB: International Conference of Islamic Economics and Business*, 2(1), 267–281.